



Mengatasi Pertikaian Masalah Tanah di Sektor Perkebunan Minyak Kelapa Sawit Melalui Mediasi yang Kolaboratif

Interfensi dari Ombudsman CAO di Sambas, Indonesia - Kelompok Wilmar Laporan Penutup

Bulan Oktober 2009

Dokumen ini merangkum tanggapan dari suatu keluhan yang disampaikan kepada Ombudsman CAO, terhadap Kelompok Wilmar mengenai perkembangan perkebunan kelapa sawit mereka di wilayah Kalimantan Barat, Indonesia. Walaupun tanggapan dari CAO terhadap keluhan ini, melibatkan dua fungsi CAO sebagai Ombudsman dan kompians, dokumen ini berpusat kepada tanggapan CAO sebagai Ombudsman. Dokumen-dokumen dasarnya bisa dilihat di situs CAO: www.cao-ombudsman.org

Keluhan

Pada bulan Juli tahun 2007, CAO menerima keluhan dari kelompok-kelompok komunitas dan organisasi-organisasi sipil masyarakat, mengenai pencemaran sosial dan lingkungan yang mereka percayai dikarenakan oleh Wilmar melalui perkebunan-perkebunan minyak kelapa sawit mereka di Indonesia.

CAO menerima keluhan-keluhan dari komunitas-komunitas yang terkena dampak sosial dan lingkungan dari proyek-proyek yang menerima dana dari IFCI atau MIGA. Kelompok Wilmar menerima dana dari IFCI.

Keluhan yang diajukan melibatkan bermacam-macam masalah, dari masalah pembersihan tanah adat, milik penduduk asli dengan tanpa izin ataupun tanpa dukungan komunitas luas, sampai ke keprihatinan tentang dampak-dampak lingkungan dari pada penebangan hutan-hutan utama serta daerah-daerah yang mempunyai nilai konservasi tinggi, sampai ke keprihatinan mengenai soal pemenuhan persyaratan IFC, yang bersangkutan dengan prosedur operasional dan persyaratan-persyaratan yang telah dipenuhi mereka. Keluhan ini juga mempertanyakan apakah semua tindakan perusahaan adalah legal.

Proses/pendekatan

Pertama-tama CAO memberi jawaban terhadap keluhan tersebut dengan mempelajari situasi dan mengadakan diskusi-diskusi terpisah dengan pihak-pihak yang bersangkutan –

komunitas-komunitas lokal dan organisasi-organisasi masyarakat sipil, termasuk mereka yang mengajukan keluhan-keluhan, wakil-wakil dari perusahaan, pemerintah setempat, para cendekiawan, tetangga-tetangga - dengan tujuan untuk mengerti akan keprihatinan semua pihak, posisi mereka, dan mengajukan usulan-usulan bagaimana cara yang terbaik untuk mengatasi masalah-masalah yang ditimbulkan oleh keluhan itu. Jawaban-jawaban yang kami terima dirangkum dalam keluhan dengan nama penafsiran pendahuluan dari keluhan.



CAO mengusulkan membagi masalah-masalahnya dalam tiga macam, setiap masalah akan diatasi secara berbeda.

- Keprihatinan-keprihatinan yang ada hubungannya dengan perkebunan-perkebunan milik perusahaan, dan dampaknya terhadap komunitas-komunitas,

serta lingkungan. Wilmar dan anggota-anggota komunitas telah menyetujui untuk mengadakan proses diskusi guna menyelesaikan masalah-masalah ini.

- Keprihatinan-keprihatinan yang ada hubungannya dengan ketaatan IFC terhadap peraturan-peraturannya dan prosedur-prosedurnya sendiri. Hal ini dibicarakan dalam "independent audit" oleh CAO.
- Keprihatinan-keprihatinan yang ada hubungannya dengan dampak-dampak lingkungan yang lebih luas dan kebiasaan-kebiasaan industri akan ditanggapi dengan melalui diskusi-diskusi bilateral antara para pengeluh dan perusahaan, serta melalui proses yang sudah ada yaitu pertemuan meja-bundar mengenai minyak kelapa sawit di antara para pemegang saham. Pemerintah Indonesia, perlu terlibat dalam menangani masalah-masalah yang ada hubungannya dengan pembokaran tanah dan proses persetujuan lokal.

Proses mediasi

Pertama-tama CAO membuat suatu kegiatan yang dapat menimbulkan rasa kepercayaan. Diskusi dengan kedua belah pihak dapat menyingkap batas lingkup yang dibutuhkan untuk menghasilkan proses yang berhasil. Dalam konteks ini Wilmar menyetujui untuk membuat suatu moratorium jika berkehendak untuk membuka hutan lagi supaya diadakan diskusi atas permintaan dari pihak yang mengajukan keluhan. Persetujuan dari perusahaan ini membantu memperlihatkan bahwa Wilmar setuju mengadakan diskusi dengan tujuan baik. Peraturan-peraturan dasar untuk diskusi ini sudah disetujui oleh kedua



belah pihak akhir bulan Mei tahun 2008 yang lalu, dan direkam dalam Nota Kesepahaman (MOU) untuk memulai negosiasi dan dalam kode etik yang lebih mendetail.

CAO kemudian bekerja sama dengan komunitas-komunitas dan perusahaan untuk membantu mereka mempersiapkan proses mediasi. Seperti misalnya, bagaimana posisi mereka disiapkan dan siapa saja yang perlu menghadiri diskusi tersebut, untuk meyakinkan bahwa keputusan-keputusan itu ditaati dalam waktu yang lama, dan mendapat dukungan dari kelompok-kelompok yang lebih besar, mempersiapkan mereka supaya mempunyai wakil-wakil yang siap untuk berdiskusi dan bernegosiasi.

Jikalau proses mediasi telah berjalan, semua pihak bekerja sama untuk membuat suatu gambaran yang memusatkan perhatian pada hal-hal yang sedang dipertikaikan. Pelatihan ini membantu menciptakan suatu kerja-sama mendasar di mana dapat dipakai untuk dasar dialog dan diskusi lebih lanjut, serta memperlihatkan sejak dini bahwa dialog itu bisa membuahkan hasil yang lebih menguntungkan. Pemerintah lokal juga terlibat sebagai pemegang peranan penting, karena tanpa mereka pertikaian tanah tidak dapat diselesaikan dan hasil-hasil dialog tidak dapat dilaksanakan.

Sepanjang proses dialog, CAO telah mengadakan 6 kali negosiasi. Disamping negosiasi, CAO berkonsultasi dengan semua pihak yang bersangkutan dan kelompok-kelompok komunitas, perusahaan, dan kepada orang-orang yang menanda-tangani keluhan untuk memberi dukungan dan memperkuat prosesnya.

Hasil-hasilnya

Pada bulan Oktober dan Nopember tahun 2008, lebih dari 1000 anggota komunitas Senujuh dan Sajingan Kecil dan Kelompok Wilmar, telah menyetujui untuk mengakhiri permasalahan tanah seluas 3170 hektar dengan syarat-syarat Sebagai berikut:

- Pengembalian 1699 hektar tanah hutan milik komunitas.
- Perusahaan memberi kompensasi kepada pemilik-pemilik tanah yang sudah dialokasikan dan juga karena kerugian yang

- mereka derita akibat pembersihan hutan.
- Perusahaan akan menyediakan dana investasi komunitas guna keperluan bersama dan akses demi kesempatan-kesempatan perkembangan untuk komunitas yang lebih luas.

Sebagai tambahan dari pada hasil-hasil yang khusus ini, Wilmar juga telah menyetujui untuk melaksanakan pendekatan yang lebih baik, guna mengatasi konflik-konflik sosial yang luas lagi, setelah banyak belajar dari pengalaman ini. CAO telah membantu pihak-pihak di propinsi Riau dan Jambi di Sumatra sebagai pemantau dan mentor guna membantu membina kapasitas di negara ini.



Pelaksanaan

Suatu tim kerja-sama untuk memantau dan mengevaluasi masalah ini telah dibentuk. Tujuannya ialah untuk memastikan bahwa persetujuan-persetujuan ini dilaksanakan. Dan Ombudsman dari CAO tetap aktif berhubungan dengan semua pihak, membantu mereka menangani keprihatinan-keprihatinan yang timbul. Atas permintaan masyarakat sipil dan pihak-pihak lain, CAO telah menyetujui untuk mengadakan pelatihan dan pembelajaran dari pengalaman melalui workshops di RSPO dan di Indonesia secara lebih luas lagi.

Wawasan-wawasan

Kasus ini menggambarkan bahwa suatu pertikaian yang kompleks melibatkan perusahaan-perusahaan, komunitas-komunitas, dampak tanah dan lingkungan dapat diselesaikan secara efektif dengan pendekatan

yang kolaboratif. Ada banyak wawasan yang penting dari pengalaman ini, yang kita percayai akan sangat berguna untuk orang-orang lain.

1. Wawasan: Membangun kapasitas dari semua pihak adalah suatu ramuan penting untuk suatu kesuksesan.

Pada permulaan proses resolusi pertikaian, perusahaan dan para pengeluh dari komunitas, kedua-duanya mengekspresikan keprihatinan yang sama, bahwa lawannya tidak cukup berhasrat untuk ataupun berwenang untuk memutuskan atas nama kelompok mereka masing-masing. Perusahaan memberikan reaksi terhadap keprihatinan-keprihatinan dengan meyakinkan para pejabat yang relevan dari tingkat lokal, nasional dan internasional yang terlibat dalam negosiasinya. Lebih lanjut lagi, pegawai staff dari peringkat yang berbeda mendapat insentif dan prioritas yang berbeda: implikasi dari sukses atau gagalnya proses dialog ini mengakibatkan implikasi strategis terhadap segenap kelompok Wilmar, jauh dari bagian kecil perusahaan Wilmar setempat, dan dengan adanya staf perusahaan yang bersangkutan yang membicarakan sudut pandang ini dalam dialog.

Perusahaan prihatin bahwa suatu perjanjian - setelah diajukan pada forum negosiasi - kemungkinan tidak akan mendapat dukungan dari komunitas yang lebih besar - yang berarti bahwa para wakil dan LSM mungkin tidak mendapat ijin dari komunitas untuk berunding atas nama mereka. Menginventasikan waktu dan memberikan fasilitas yang netral dapat dipergunakan untuk mempelajari tradisi yang sudah ada, struktur dari kepemimpinan yang terpilih dan yang ditunjuk dari komunitas. Berdasarkan kinerja ini, para wakil tertolong untuk menambah pengetahuan mereka pada waktu berdialog, berbagi informasi secara efektif dengan komunitas yang lebih luas dan menciptakan konsensus dalam membuat keputusan-keputusan yang penting pada waktu diadakan perundingan. Pemberi fasilitas lokal yang bisa dipercaya, merupakan suatu aset yang kuat dalam proses ini dan bisa jadi kunci untuk kesuksesan.

2. Wawasan: menciptakan suatu persetujuan dalam bentuk Nota Kesepahaman (MOU) permulaan atau peraturan-peraturan dasar meningkatkan prediksi dan memberikan harapan yang lebih jelas.

Suatu perjanjian permulaan telah dicapai atas

dasar peraturan-peraturan dasar untuk mengadakan proses dialog. Persetujuan ini menguatkan bahwa ada tujuan yang sama dan juga membuat dialognya lebih mudah diduga, karena semua pihak mempunyai pengertian mengenai apa yang dapat mereka atasi, dan bagaimana mereka dapat bertindak. Nota Kesepahaman (MOU) itu menciptakan dugaan yang tadinya konteksnya tidak menentu, beresiko tinggi dan sangat kontraversial.

Nota Kesepahaman (MOU) menciptakan peranan dan tanggung jawab dari setiap pihak, harapan-harapan untuk mengambil keputusan (dalam hal ini, melalui konsensus dan tidak melalui pemilihan suara) dan apa yang harus



dikerjakan jikalau ada suatu perselisihan ataupun jalan buntu. Nota Kesepahaman (MOU) juga termasuk peraturan-peraturan berkomunikasi, penyingkapan, memonitor/menindak-lanjuti dan berbagi informasi dengan wakil-wakil secara lebih luas. Barangkali, yang terpenting ialah, ada suatu komitmen dari perusahaan dan komunitas untuk menjadikan proses itu satu-satunya jalan untuk berdialog. Komitmen ini memberi semangat kepada kedua belah pihak untuk mengatasi jalan buntu dalam proses ini, dari pada mencari keluar jikalau diskusi-diskusi menjadi sangat sulit atau berhenti sementara.

Keuntungan proses Nota Kesepahaman (MOU) lebih lanjut ialah, dengan menciptakannya, semua pihak bisa melihat - secara praktis - bahwa mereka dapat menyetujui hal-hal yang kecil, dan tidak menimbulkan resiko tinggi. Langkah kecil ini merupakan suatu kesuksesan yang bisa dijalin selama dialog. Proses bersama untuk memetakan penggunaan tanah - yang membawa ke dua pihak ke lapangan untuk

memeriksa bersama batas-batas tanah adalah suatu kesuksesan praktis, tapi suatu persetujuan yang sama pentingnya yang juga menciptakan momentum.

3. Wawasan: Masalah-masalah sistem dapat mulai diatasi melalui solusi-solusi lokal.

Adalah sangat jelas dari permulaan bahwa masalah yang diajukan ke CAO di Sambas tidaklah unik. Masalah ini menimbulkan, paling sedikit sebagian, karena perbedaan-perbedaan cara, orang-orang setempat, pemerintahan setempat dan pemerintahan nasional melihat koneksi mereka dengan tanah, dan bagaimana cara mengakses dan menggunakan tanah itu oleh komunitas diakui dan diketahui oleh pemerintahan sebelumnya. Jadi salah satu bagian dari pada masalahnya terletak pada prosedur yang rumit dan kadang kala tidak jelas untuk meminta ijin-ijin menggunakan tanah. Dengan melibatkan wakil-wakil pemerintahan sebagai pemantau dalam proses dialog, adalah mungkin untuk mengerti lebih dalam bermacam-macam sebab konflik yang mendasar dan struktural.

Partisipasi dari manager lokal and senior dari Wilmar, telah menimbulkan kemajuan di peringkat korporate sehingga perusahaan lebih terlengkapi untuk mengatasi pertikaian dengan dasar yang lebih sistematis. CAO melaporkan kepada manajemen IBRD dan IFC mengenai masalah tanah struktural, juga kepada IFC untuk mengusulkan jawaban yang lebih sistematis, yang dapat membantu komunitas-komunitas, pemerintahan, dan para investor mengatasi tantangan ini secara lebih efektif.

Akhirnya, kasus ini memberi tanda yang lebih kuat kepada perusahaan-perusahaan dan komunitas bahwa solusi yang efektif dan praktis dapat dijalankan melalui suatu pendekatan kolaboratif untuk mengatasi pertikaian yang rumit. Kemauan kedua belah pihak mengenyampingkan posisi berlawanan yang sangat tipikal dan mencari solusi bersama telah membuahkan hasil-hasil positif, dan dalam jangka waktu pendek.

Informasi lebih lanjut mengenai kasus Wilmar termasuk ketaatannya terhadap CAO beserta laporannya bisa dilihat di:

www.cao-ombudsman.org